

DAFTAR PUSTAKA

- Article 19., Yayasan TIFA. 2010. Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokumen diakses di alamat *website*: <http://www.article19.org/pdfs/publications/laporan-penelitian.pdf> . pada 11 November 2015.
- Canel, M. J. and Sanders, K. 2011. *Government Communication, International Encyclopedia of Communication Online*, Wiley Blackwell.
- Cheema, S. Shabbir & Rondinelli, Dennis A. 1983. *Implementating Decentralization Programmes in Asia: Local Capacity for Rural Development*. UNCRD. Nagoya
- Dominick, Joseph R. 2004. *The Dynamics of Mass Communication; Media in the Digital Age 8th.ed*. New York. The McGraw-Hill Companies.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington. Congressional Quarterly Press.
- Foucault, Michel. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. New York. Vintage Books.
- . 1982a. *Technology of The Self. In The Essential Foucault*. New York. The New Press.
- Garnet, James L. “*Effective Communications in Government*”, dalam James L. Perry, editor. 1989. *Handbook of Public Administration*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- .1997. *Handbook of Administrative Communication Public Administration and Public Policy*. New York. Marcel Dekker.Inc.
- Goldhaber, Gerald M. 1993. *Organizational Communication 6th Edition*. McGraw-Hill. New York.
- Gondokusumo, A.A. 1995. *Komunikasi Penugasan*. Jakarta. Gunung Agung.
- Grin, John and Hank Van De Graaf. 1996. *Implementation as Communicative Action: An Interpretive Understanding of Interaction Between Policy Actors and Target Groups*. Policy Science.

- Habermas, Jurgen. 1991. *The Structural Transformation of The Public Sphere*. First MIT Press paperback edition.
- Hardjana, Andre. 2016. *Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Howlett, Michael. 2009. *Government communication as a policy tool: a framework for analysis*. *Canadian Science Review* , 3 (2), 23–37.
- Howlett, Michael., & Giest, Sarah. 2013. *Routledge Handbook of Public Policy: Chapter 2 The Policy-Making Process*. USA. Routledge
- <http://dinhubkominformo.purbalinggakab.go.id/?p=1050> .Purbalingga, Salah Satu Kabupaten dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik di Jawa Tengah. diakses pada 10 Oktober 2015.
- <http://ppid.kominfo.go.id/about/> . Profil PPID Kemkominfo. diakses pada 10 Oktober 2015.
- <http://www.purbalinggakab.go.id/index.php/kepemerintahan/1678-penanggulangan-kemiskinan-menjadi-prioritas-kebijakan-kabupaten-purbalingga-tahun-2016.html>. Penanggulangan Kemiskinan Menjadi Prioritas Kebijakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Diakses pada 16 Oktober 2015.
- <http://www.jatengprov.go.id/en/node/4219>. KIP Tetapkan 10 Nominator Terbaik se Jateng, diakses pada 10 Oktober 2015.
- <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/laporan-tugas> . Laporan Tugas Bidang Penanganan Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2014, diakses pada 11 November 2015.
- <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view?slug=menurut-anda-bagaimana-dengan-informasi-yang-ada-pada-badan-privat> , diakses pada 25 Juni 2015.
- Knoke, David and James Kulkinskni. 1982. *Network Analysis*. London. Sage Publication.
- Liu, B. F., Horsley, S. J., & Levenshus, A. B. 2010. *Government and corporate communication practices: do the differences matter?*. *Journal of Applied Communication Research* , 38 (2), 189–213.
- Mazmanian, Daniel A. dan Sabatier, Paul A. 1983. *Implementation and Public Policy*. New Jersey. Scott, Foresman and Company.

- Meter, Donald S. Van & Horn, Carl E. Van. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society*, Vol. 6, No. 4. pp. 445-488. London. Sage Publication.
- Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. UI-Press.
- Pace.R.W., Faules.D.F. 2013. Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Terj.Mulyana D.* Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne.2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan.* (edisi terjemahan). Prenada Media. Jakarta
- Pratikno, dkk.2012. Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. FISIPOL UGM Yogyakarta.
- Ripley, Randall B. dan Franklin, Grace A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy.* Chicago. The Dorsey Press.
- Richard J. Stilman II. 1992. *Public Administration: Concepts and Cases.* Boston. Houghton Mifflin Company.
- Stake R. 2005. *Qualitative Case Studies* in Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (eds.) *The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd ed.)*. Thousand Oaks/London/New Delhi. Sage Publications
- Strong. C. F. 1960. *Modern Political Constitutional.* London. Sidgwick and Jackson, Ltd.
- Tim Penyusun S2 PLOD UGM. 2004. Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah. Yogyakarta. Global Media.
- United Nations Development Programme. 2007. *Public Administration and Democratic Governance.* New York. UNDP.
- West, Richard.,& Turner, Lynn H. 2008. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Buku 1. *Terj. Maer.M.N.D* Jakarta. Salemba Humanika.
- Yin, Robert K. 2014. Studi Kasus Desain & Metode. Rajawali Pers. Jakarta.

Regulasi

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Nomor 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.